

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>
- Kanon 1086. *Codex Iuris Canonici* (Kitab Hukum Kanonik 1983).  
<https://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1086>
- Kanon 1124. *Codex Iuris Canonici* (Kitab Hukum Kanonik 1983).  
<https://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1124>
- Kanon 1125. *Codex Iuris Canonici* (Kitab Hukum Kanonik 1983).  
<https://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1125>
- Kanon 1129. *Codex Iuris Canonici* (Kitab Hukum Kanonik 1983).  
<https://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1129>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Makale*. 2022.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec7d7227bf37b89f5c303730323538.html>
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama*. 2005.  
<https://mui.or.id/baca/fatwa/perkawinan-beda-agama>
- Mandra, I Ketut, dan I Ketut Artadi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Denpasar: Universitas Udayana Press, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Mataram University Press, 2020.  
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019

- kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, 17 Januari 2019.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rubyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik dalam Terang Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Rusli dan R. Tama. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Santoso, Budi. "Implementasi Prinsip Keadilan Sosial dalam Putusan Hakim di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 288.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Pengadilan dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (2023).  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202/uu-no-23-tahun-2006>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan HuMa, 2002.
- Wawancara dengan Bapak Helka Rerung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, yang Memeriksa Perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Makale, 26 September 2025.
- Wawancara dengan Petugas Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Makale, Kabupaten Tana Toraja, 26 September 2025, dalam rangka penelitian mengenai penetapan perkawinan beda agama Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Makale.